

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN IDENTITAS RESPONDEN

2.1. Sejarah

2.1.1. *Sejarah Singkat Perkembangan Bank Indonesia*

Bank Indonesia atau BI adalah bank sentral Indonesia yang bertanggung jawab untuk memelihara stabilitas mata uang rupiah pada bidang Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia. Sejarah berdirinya Bank Indonesia sendiri bisa ditarik ke belakang hingga pada masa kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara pada abad ke-16. Tetapi secara pasti pendirian De Javasche Bank pada tahun 1829-lah yang menjadi titik awal berdirinya Bank Indonesia saat ini.

De Javasche Bank adalah bank sirkulasi pertama di Asia. Pemerintah Belanda memberikan octrooi atau hak khusus ke De Javasche Bank (DJB) agar berperan sebagai bank sirkulasi. DJB sebagai bank sirkulasi, berhak mencetak dan mengedarkan uang kertas Gulden di Hindia Belanda. Hak Octrooi tersebut diperbarui pada 10 tahun sekali. Pada tahun 1922, pemerintah Belanda memberlakukan De Javasche Wet Bank Act. Istilah baru DJB Wet fokus pada sistem pembayaran di Hindia Belanda. Pada era DJB Wet, pertumbuhannya pesat dengan berdirinya 16 cabang. Jumlah tersebut terus bertambah hingga akhirnya Jepang merilis data dari Indonesia. Kedatangan Jepang di Pulau Jawa pada tahun 1942 membuat DJB Wet memindahkan semua asetnya keluar dari Nusantara. Selain itu pemerintah Jepang juga memerintahkan untuk melikuidasi semua bank Belanda, Inggris dan beberapa bank Cina. Antara tahun 1942 dan 1944, didirikan Nanpo Kaihatsu Ginko, yang berperan untuk mengedarkan uang invasi. Mata uang

invasi yang dicetak di Jepang terdiri dari tujuh pecahan, mulai dari 1 dong hingga 10 dong.

Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha untuk mendapatkan kembali kendali atas Indonesia melalui *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA). Sementara itu, NICA memulihkan DJB untuk mencetak dan mengedarkan koin NICA. Hal ini dimaksudkan untuk menggoyahkan perekonomian Indonesia. Sesuai mandat yang tertulis dalam penjelasan UUD 45 pasal 23 yaitu “Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan Undang-undang”, maka Pemerintah Republik Indonesia membentuk bank sirkulasi yaitu Bank Negara Indonesia (BNI). Dalam upaya menjaga kedaulatan ekonomi, BNI menerbitkan uang logam dengan nama Oeang Republik Indonesia (ORI). Keberadaan BNI RI dan DJB NICA menyebabkan terjadinya dualisme bank beredar di Indonesia dan munculnya perang mata uang (*currency wars*). Saat itu, DJB silver disebut "uang merah" dan ORI disebut "uang putih".

Dan akhirnya pada tanggal 30 Oktober 1946 diterbitkan Oeang Repoebliek Indonesia (ORI) untuk pertama kalinya. Dengan diterbitkannya ORI ini, uang logam Jepang dan Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada tahun 1951, pemerintah bermaksud menasionalisasi DJB. Pada tanggal 19 Juni 1951, pemerintah membentuk Komisi Nasionalisasi DJB. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1951, undang-undang no. 24/1951 tentang Nasionalisasi DJB. Nasionalisasi tersebut dilakukan melalui pembelian 99,4% saham DJB senilai 8,9 juta Gulden. Pada bulan September 1952, pemerintah menyerahkan Rancangan

Undang-Undang (RUU) Pokok Bank Indonesia kepada Majelis Nasional dan mempertimbangkannya. Pada tanggal 10 April 1953, Majelis Nasional menyetujui RUU Pokok Bank Indonesia. Pada bulan Mei 1953, tepatnya tanggal 29, Presiden Soekarno menandatangani RUU Pokok Bank Indonesia menjadi undang-undang (UU). Pada tanggal 1 Juli 1953 diundangkan Undang-Undang Dasar Perbankan Indonesia, sehingga sejak tanggal 1 Juli 1953, Indonesia mempunyai bank sentral yang bernama Bank Indonesia.

2.1.2. Sejarah Singkat Sistem Pembayaran QRIS

Quick Response Indonesian Standart atau QRIS merupakan salah satu sistem pembayaran non-tunai di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019. Peluncuran sistem pembayaran QRIS merupakan salah satu wujud lima visi sistem pembayaran Indonesia pada tahun 2025 yang bertujuan untuk subur dalam ekosistem digital dan keuangan yang menguntungkan di Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa QRIS yang mengusung semangat UNGGUL (UNiversal, GampanG, Untung dan Langsung), bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat akses pembiayaan, memajukan UMKM yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia maju. Semangat tersebut sejalan dengan tema peringatan 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yaitu sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju.

Tahap pertama QRIS berfokus pada penerapan model pembayaran kode QR (MPM), di mana *merchant* (penjual) akan menampilkan kode QR pembayaran untuk dipindai oleh pembeli (pelanggan) pada saat proses *checkout* transaksi pembayaran. Sebelum dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia, spesifikasi standar QR Code dan konektivitasnya telah diuji. Pengujian tahap pertama dilaksanakan bulan September sampai November 2018 dan uji tahap kedua bulan April sampai Mei 2019.

QRIS didirikan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dengan menggunakan standar internasional EMV Co.1 untuk mendukung konektivitas alat sistem pembayaran yang lebih luas dan memenuhi kebutuhan spesifik antar negara untuk memfasilitasi *interoperabilitas* antar pemasok, antar alat, termasuk antar negara.

2.2. Visi dan Misi

2.2.1. Visi Bank Indonesia

Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia maju.

2.2.2. Misi Bank Indonesia

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran Kebijakan Bank Indonesia;
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makro prudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikro prudensial Otoritas Jasa Keuangan;

3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah ditingkat nasional hingga ditingkat daerah;
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

2.2.3. *Visi QRIS*

Visi sistem pembayaran ini mengacu pada salah satu 5 visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang di keluarkan oleh BI yaitu “Transformasi digital di Sistem Pembayaran Indonesia dalam membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital”

2.2.4. Misi QRIS

QRIS menggunakan jargon semangat UNGGUL (UNiversal, GampanG, Untung dan Langsung). Semangat tersebut memiliki arti terus mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMK. Pertama, UNiversal, penggunaan QRIS bersifat inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik dan luar negeri. Kedua, GampanG, masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggam ponsel. Ketiga, Untung, transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel. Keempat, Langsung, transaksi dengan QRIS langsung terjadi, karena prosesnya cepat dan seketika sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran.

2.3. Logo dan Makna Perusahaan

2.3.1. Logo Bank Indonesia

Logo perusahaan merupakan identitas penting bagi sebuah perusahaan agar mudah untuk dikenali, berikut adalah logo Bank Indonesia :



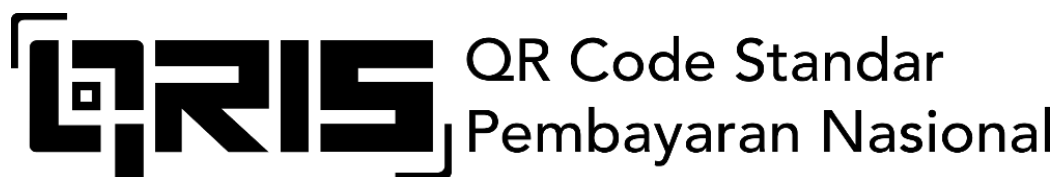
Gambar 2. 1 Logo Bank Indonesia

Sumber : bi.go.id (2023)

Logo BI melekat erat dengan logo De Javasche Bank yang telah melalui bertransformasi dari waktu ke waktu. Pada awal pembuatannya logo Bank Indonesia mengadaptasi logo Bank De Javasche yang mengganti huruf “J” dengan huruf “I” tanpa ada perubahan elemen lain. Seiring berjalannya waktu, dan dengan pertimbangan estetika dan visual, logo BI diperbaharui menjadi lebih kokoh, dan bergengsi seperti saat ini.

2.3.2. *Logo QRIS*

QRIS adalah sistem pembayaran yang diluncurkan oleh Bank Indonesia yang memiliki logonya sendiri untuk memudahkan dikenali masyarakat, berikut adalah logo QRIS :



Gambar 2. 2 Logo QRIS

Sumber : qris.online (2023)

Logo QRIS berbentuk seperti *QR code* sebagaimana sistem pembayaran ini bekerja yaitu dengan *scan QR Code*. Selain itu juga terdapat manfaat yang akan didapat ketika menggunakan QRIS antara lain

Bagi pengguna aplikasi pembayaran: *just scan and pay!*

1. Cepat dan kekinian.
2. Tidak perlu repot lagi membawa uang tunai.
3. Tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang.

4. Terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.

Bagi *Merchant*:

1. Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apa pun.
2. Meningkatkan *branding*.
3. Kekinian.
4. Lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS.
5. Mengurangi biaya pengelolaan kas.
6. Terhindar dari uang palsu.
7. Tidak perlu menyediakan uang kembalian.
8. Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat.
9. Terpisahnyanya uang untuk usaha dan personal.
10. Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai.
11. Membangun informasi *credit profile* untuk memudahkan memperoleh kredit ke depan.

2.4. Produk dan Layanan

2.4.1. Produk dan Layanan Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki komitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai rupiah dengan pengelolaan sektor mata uang, sistem pembayaran, dan sistem keuangan. Ketiga bidang tersebut dikelola menggunakan kebijakan yang dikeluarkan oleh

Bank Indonesia dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan bersama berbagai perangkat yang disesuaikan dengan tugas masing-masing.

2.4.1.1. Bidang Moneter

Tujuan utama kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah untuk menjamin stabilitas nilai rupiah, menjaga stabilitas sistem pembayaran, dan membantu menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang berisi tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Istilah “stabilitas nilai Rupiah” yang dimaksudkan tersebut adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar Rupiah.

Konsep stabilitas nilai rupiah mencakup stabilitas harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Stabilitas harga barang dan jasa biasanya diukur dengan inflasi yang rendah dan stabil. Sedangkan kestabilan nilai tukar rupee diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Stabilitas nilai tukar rupiah dalam kondisi inflasi yang rendah dan stabil, serta stabilitas nilai tukar rupiah, sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas nilai tukar rupiah diperlukan dan merupakan bagian integral dari upaya mendukung inflasi yang rendah dan stabil.

2.4.1.2. Bidang Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi sistem keuangan yang efisien dan efektif serta mampu menahan gejolak yang berasal dari dalam dan luar negeri. Dengan menjaga stabilitas sistem keuangan, maka fungsi intermediasi dan jasa

keuangan sistem keuangan lainnya dapat berfungsi secara optimal untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian negara. Oleh karena itu, stabilitas sistem keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian.

Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makro prudensial melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan; memitigasi dan mengelola risiko sistemik; serta meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, UU memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan:

1. Pengaturan makro prudensial;
2. Pengawasan makro prudensial, termasuk pemeriksaan dan pengenaan sanksi;
3. Pengaturan dan pengembangan pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan;
4. Penyediaan dana untuk Bank dalam rangka menjalankan fungsi *lender of the last resort*;
5. *Reverse repo (repurchase agreement)* dan/atau pembelian surat berharga negara yang dimiliki oleh LPS pada saat LPS memerlukan likuiditas; dan
6. Koordinasi dengan otoritas terkait.

2.4.1.3. Bidang Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah

Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep 'uang' sebagai media pertukaran (*medium of change*) atau *intermediary* dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (*settlement*).

Salah satu bentuk sistem pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah sistem pembayaran *Quick Response Indonesian Standart* (QRIS). Pembuatan sistem tersebut sesuai dengan visi SPI yaitu transformasi digital yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.4.2. Produk dan layanan QRIS

Sistem pembayaran QRIS dapat digunakan disemua aplikasi pembayaran, baik bank maupun non bank yang digunakan oleh masyarakat. Pembayaran dapat digunakan diseluruh toko, *merchant*, lapak, parkir, tiket wisata, donasi (*merchant*) yang berlogo QRIS. Pembayaran juga dapat dilakukan meskipun penyedia QRIS yang digunakan toko berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan pelanggan. Pemilik usaha cukup membuka akun atau rekening disalah satu penyedia QRIS yang disetujui BI.

Terdapat beberapa jenis pembayaran menggunakan sistem pembayaran QRIS yaitu

1. *Merchant Presented Mode (MPM) Statis*

Jenis yang pembayaran QRIS yang paling mudah, *merchant* cukup memajang satu stiker atau *print-out* QRIS dan gratis. Pengguna hanya melakukan *scan*, masukkan nominal, masukkan PIN dan klik bayar. Notifikasi transaksi langsung diterima pengguna ataupun *merchant*. QRIS MPM Statis sangat cocok bagi usaha mikro dan kecil.

2. *Merchant Presented Mode (MPM) Dinamis*

QR dikeluarkan melalui suatu *device* seperti mesin EDC atau *smartphone* dan gratis. *Merchant* harus memasukkan nominal pembayaran terlebih dahulu, kemudian pelanggan melakukan *scan* QRIS yang tampil atau tercetak. QRIS MPM Dinamis sangat cocok untuk *merchant* skala usaha menengah dan besar atau dengan volume transaksi tinggi.

3. *Customer Presented Mode (CPM)*

Pelanggan cukup menunjukkan QRIS yang ditampilkan dari aplikasi pembayaran pelanggan untuk di-*scan* oleh *merchant*. QRIS CPM lebih ditujukan untuk *merchant* yang membutuhkan kecepatan transaksi tinggi seperti penyedia transportasi, parkir dan ritel modern.

2.5. Identitas Responden

Responden pada studi ini merupakan masyarakat Kota Semarang yang tertarik dan atau pernah melakukan transaksi menggunakan sistem pembayaran QRIS. Identitas responden disajikan untuk mengetahui keadaan atau latar belakang responden sebagai sampel. Identitas responden diuraikan melalui pengelompokan berdasarkan

usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, pendidikan terakhir, penghasilan per bulan, tujuan penggunaan QRIS dan *patfrom* yang digunakan ketika melakukan transaksi menggunakan QRIS. Sebagaimana yang telah dibahas pada metodologi penelitian, jumlah responden pada studi ini sejumlah 100 orang. Pemilihan responden menggunakan beberapa kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Minimal sudah berusia 17 tahun
2. Berdomisili di Kota Semarang
3. Pengguna e-Wallet atau m-Banking
4. Pernah dan atau tertarik bertransaksi menggunakan QRIS

2.5.1. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Usia yang diteliti dalam penelitian ini adalah responden yang minimal berusia 17 tahun. Hal ini dideskripsikan pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Pengelompokan Responden Berdasarkan Umur

Kelompok Usia	Frekuensi	Persentase (%)
17-19 Tahun	9	9,00
20-22 Tahun	48	48,00
23-25 Tahun	33	33,00
26-28 Tahun	5	5,00
29-31 Tahun	3	3,00
32-34 Tahun	1	1,00
35-37 Tahun	1	1,00
Jumlah	100	100,00

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui bahwa mayoritas usia responden adalah pada rentang 20-22 yaitu sebesar 48%. Kemudian dilanjutkan dengan rentang 23-25

yaitu sebesar 33%. Dengan sisanya adalah rentang 17-19 tahun yaitu 9%, usia 26-28 tahun sebanyak 5%, usia 29-31 tahun sebanyak 3%, usia 32-34 tahun sebanyak 1% dan usia 35-37 sebanyak 1%. Dengan angka tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berada dalam rentang usia produktif untuk bekerja, sehingga responden memiliki semangat dan motivasi untuk menggunakan sistem dalam rangka menunjang aktivitas mereka.

2.5.2. Identitas Responden Berdasarkan Wilayah

Wilayah disini merupakan tempat di mana peneliti menemukan responden yang bersedia untuk mengisi kuesioner penelitian. Pengelompokan wilayah dilakukan berdasarkan sistem pembagian wilayah kota yang terdiri atas 16 kecamatan di Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini berhasil mengumpulkan responden dengan pengelompokan wilayah seperti pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Pengelompokan Responden Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Frekuensi	Persentase (%)
Timur	24	24,00
Selatan	24	24,00
Barat	21	21,00
Utara	17	17,00
Tengah	14	14,00
Jumlah	100	100,00

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Dari data di tabel 2.2 dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak diperoleh di Wilayah Semarang Timur dan Selatan sebanyak masing-masing 24 orang (24%), kemudian wilayah Semarang Barat sebanyak 21 orang (21%), dan

Wilayah Semarang Utara sebanyak 17 orang (17%). Sisanya diperoleh di Wilayah Semarang Tengah sebanyak 14 orang (14%).

2.5.3. *Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin*

Penelitian ini terbuka baik itu responden laki-laki maupun perempuan yang dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Perempuan	71	71,00
Laki-laki	29	29,00
Jumlah	100	100,00

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2.3 dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 71%. Sehingga ada kecenderungan pengguna QRIS adalah berjenis kelamin perempuan walaupun tidak terlalu signifikan.

2.5.4. *Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan*

Dalam penelitian ini, pekerjaan responden dapat diartikan sebagai pekerjaan utama atau aktivitas utama yang dilakukan tiap responden.

Tabel 2. 4 Pengelompokan Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Presentase (%)
Pelajar/Mahasiswa	61	61,00
Karyawan swasta	32	32,00
Karyawan BUMN	2	2,00
Fresh Graduate	2	2,00

Pekerjaan	Frekuensi	Presentase (%)
CEO	1	1,00
Freelance	1	1,00
Ibu Rumah Tangga	1	1,00
Jumlah	100	100,00

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa sebesar 61% . Selanjutnya responden yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta sebesar 32%, responden dengan pekerjaan karyawan BUMN sebesar 3%. Responden yang memiliki pekerjaan CEO, *fresh graduate*, *freelance*, dan ibu rumah tangga sebesar 5%.

2.5.5. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan memiliki pengaruh terhadap pola pikir, gaya hidup, dan status sosial seseorang. Sehingga tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi pengalaman penggunaan dari sebuah sistem informasi. Berikut adalah data pengguna QRIS berdasarkan pendidikan terakhir.

Tabel 2. 5 Pengelompokan Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SMA	66	66,00
Sarjana	29	29,00
Diploma	4	4,00
S2	1	1,00
Jumlah	100	100,00

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Dari tabel 2.5 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 66%. Kemudian terbanyak ke dua adalah

sarjana yaitu 29%. Selanjutnya adalah tingkat pendidikan diploma sebanyak 4% dan terakhir S2 sebanyak 1%.

2.5.6. Identitas Responden Berdasarkan Penghasilan Per bulan

Dalam penelitian ini, penghasilan per bulan yang memiliki arti penghasilan yang didapat oleh responden sendiri dari sebuah pekerjaan atau aktivitas maupun berasal dari pemberian orang tua.

Tabel 2. 6 Pengelompokan Responden Berdasarkan Penghasilan

Rentang Penghasilan	Frekuensi	Persentase (%)
< Rp. 1.000.000	24	24,00
Rp 1.000.000 -Rp 3.000.000	57	57,00
Rp 3.000.000 - Rp 6.000.000	15	15,00
> Rp 6.000.000	4	4,00
Jumlah	100	100,00

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2.6 diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki penghasilan dengan rentang Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 sebesar 57%. Kemudian penghasilan dengan rentang < Rp 1.000.000 adalah sebesar 24%, penghasilan Rp 3.000.000 – Rp 6.000.000 sebesar 15% dan dengan penghasilan sebesar > Rp 6.000.000 sebesar 4%.

2.5.7. Identitas Responden Berdasarkan Tujuan Penggunaan QRIS

Sistem pembayaran QRIS sudah dapat digunakan di beberapa tempat seperti toko dan bahkan sebagai perantara pembayaran infaq di masjid. Dalam penelitian ini tujuan penggunaan QRIS memiliki maksud transaksi apa yang paling sering dilakukan oleh responden menggunakan QRIS.

Tabel 2. 7 Pengelompokan Responden Berdasarkan Tujuan Penggunaan QRIS

Tujuan Penggunaan	Frekuensi	Persentase
Makan	81	81,00
Fashion	11	11,00
Transportasi	7	7,00
Fotocopy	1	1,00
Jumlah	100	100,00

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Dari tabel 2.7 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menggunakan sistem pembayaran QRIS untuk bertransaksi atau membeli makanan yaitu sebesar 81%. Kemudian penggunaan dengan tujuan membeli keperluan *fashion* sebesar 11%, penggunaan dengan tujuan transportasi sebesar 7% dan untuk keperluan *fotocopy* 1%.

2.5.8. Identitas Responden Berdasarkan Platform M-Banking

Mengingat sistem pembayaran QRIS tertanam ke dalam masing-masing penyedia jasa layanan pembayaran dan tidak bisa berdiri sendiri. Dalam penelitian ini platform yang digunakan memiliki maksud platform penyedia jasa layanan pembayaran yang paling sering digunakan oleh responden untuk bertransaksi menggunakan QRIS.

Tabel 2. 8 Pengelompokan Responden Berdasarkan M-Banking

Platform M-Bank	Frekuensi	Persentase (%)
BCA	36	36,00
BRI	21	21,00
BNI	19	19,00
Mandiri	11	11,00
Tidak Menggunakan	4	4,00
Jago	3	3,00
BSI	2	2,00
Bank Permata	2	2,00
BTN	1	1,00
Jenius	1	1,00
Jumlah	100	100,00

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2.8 penggunaan platform M-Banking terbesar yang digunakan untuk melakukan transaksi QRIS adalah BCA yaitu sebesar 36%. Kemudian platform M-Banking terbesar kedua adalah BRI yaitu 21%, selanjutnya adalah BNI sebesar 19%, selanjutnya Mandiri sebesar 11% dan bank-bank lain seperti Bank Jago, Permata, BTN, Jenius adalah sebesar 9%. Sementara terdapat beberapa responden yang tidak menggunakan M-Banking sebagai platform transaksi QRIS sebesar 4%.

2.5.9. Identitas Responden Berdasarkan Platform E-Wallet

Mengingat sistem pembayaran QRIS tertanam ke dalam masing-masing penyedia jasa layanan pembayaran dan tidak bisa berdiri sendiri. Dalam penelitian ini platform yang digunakan memiliki maksud platform E-Wallet sebagai pembayaran

yang paling sering digunakan oleh responden untuk bertransaksi menggunakan QRIS.

Tabel 2. 9 Pengelompokan Responden Berdasarkan E-Wallet

Platform E-Wallet	Frekuensi	Persentase
Shopee Pay	39	39,00
Dana	27	27,00
Gopay	26	26,00
Ovo	6	6,00
Link-Aja	2	2,00
Jumlah	100	100,00

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2.9 penggunaan platform E-Wallet terbesar yang digunakan untuk melakukan transaksi QRIS adalah Shopee Pay yaitu sebesar 39%. Kemudian platform terbesar kedua adalah Dana yaitu 27%, selanjutnya adalah Gopay sebesar 26%, selanjutnya Ovo sebesar 6% dan Link-Saja sebesar 2%.